

Dana Pilgub Setara 7.641 Bedah Rumah

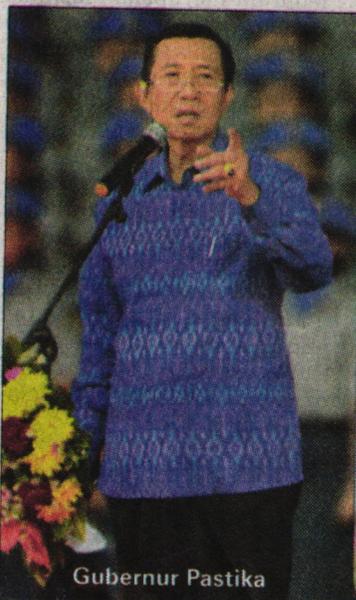
★ Pansus APBD Serahkan ke Komisi I

Gubernur
minta KPU jangan
mewah-mewahan
saat launching maskot
Pilgub Bali di Bajra
Sandhi, 28 Oktober
2017 depan

DENPASAR, NusaBali

Polemik soal revisi anggaran Pilgub Bali 2018 menyita perhatian Gubernur Made Mangku Pastika. Versi Gubernur Pastika, dana Pilgub sebesar Rp 229,36 miliar sangat fantastis, setara dengan 7.641 unit bedah rumah, setara pula dengan membangun 5 sekolah SMAN/SMKN Bali Mandara.

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1



Gubernur Pastika

DANA PILGUB BALI VS PROGRAM PRO RAKYAT

- **Dana Pilgub Rp 229,36 Miliar**
 - ✓ Bisa digunakan untuk membangun 7.641 unit bedah rumah
 - ✓ Asumsi: bedah rumah Rp 30 juta/unit
 - ✓ Ada 30.456 orang yang terselamatkan kesehatannya dengan rumah layak huni
- **Dana Pilgub Rp 229,36 Miliar**
 - ✓ Bisa membangun 1.146 unit Simantri
 - ✓ Asumsi: nilai Simantri Rp 200 juta/unit
 - ✓ Bisa untuk pengadaan 22.920 ekor sapi
- **Dana Pilgub Rp 229,36 Miliar**
 - ✓ Bisa digunakan untuk membangun 5 Sekolah SMAN/SMKN Bali Mandara
 - ✓ Asumsi: Nilai sekolah Rp 40 miliar/unit
- **Dana Pilgub Rp 229,36 Miliar**
 - ✓ Bisa bangun satu Unit RS Bali Mandara

Edisi : Selasa, 17 Oktober 2017

Hal : 1 & 15

Dana Pilgub Setara 7.641 Bedah Rumah

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Gubernur Pastika menyebutkan, kalau disetarakan dengan beberapa program Pemprov Bali, banyak hal yang bisa dikerjakan untuk rakyat Bali dengan anggaran Pilgub sebesar Rp 229,36 miliar tersebut. Intinya, anggaran sebesar Rp 229,36 miliar untuk sebuah pemilihan kepala daerah, masih terbilang tinggi.

"Memilih pemimpin itu memang mahal, dengan sistem pemilihan langsung. Saya sendiri menguliti usulan KPU Bali hingga ketemu angka Rp 229,36 miliar. Itu menurut saya masih tinggi. Saya asumsikan dana Pilgub Bali 2018 kisaran Rp 150 miliar sampai Rp 200 miliar," jelas Pastika di Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin (16/10).

Pastika bahkan sampai memerintahkan stafnya mengambil kalkulator untuk membagi bilangan Rp 229,26 miliar dengan program-program pro rakyat yang digulirkan Pemprov Bali. Pastika menegaskan, dana Pilgub sebesar Rp 229,36 miliar ini setara dengan 7.641 unit bedah rumah. Asumsinya, nilai bedah rumah Rp 30 juta per unit.

"Kalau satu bedah rumah dihuni 4 orang, maka ada 30.456 orang yang terselamatkan kesehatannya dengan dana Pilgub sebesar Rp 229,36 miliar, karena bisa tinggal di rumah layak huni," tandas Pastika yang ke-

marin didampingi Karo Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra.

Ditambahkan Pastika, dengan dana Pilgub senilai Rp 229,36 miliar, Pemprov Bali bisa menambah satu unit lagi RS Bali Mandara berstandar internasional, seperti yang sudah dibangun di Jalan Bypass Ngurah Rai Suwung, Denpasar Selatan. Selain itu, dengan dana Rp 229,36 miliar, Pemprov Bali juga bisa membangun hotel berbintang yang menghasilkan pendapatan daerah. Dan, dengan dana Rp 229,36 miliar, itu setara dengan 1.146 unit Simantri (Sistem Pertanian Terintegrasi). Asumsinya, satu unit Simantri berharga Rp 200 juta.

"Kalau satu unit Simantri dengan 20 ekor sapi, maka dana Pilgub Rp 229,36 miliar bisa untuk pengadaan 22.920 ekor sapi. Bali bisa cepat menjadi Pulau Organik," papar Gubernur asal Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Buleleng yang mantan Kapolda Bali ini.

Pastika juga mengkalkulasikan dana Pilgub Bali sebesar Rp 229,36 miliar, bisa digunakan untuk membangun 5 sekolah SMAN/SMKN Bali Mandara. "Sekolah SMAN Bali Mandara itu nilainya hanya Rp 40 miliar. Jadi, bisa punya 5 sekolah SMAN Bali Mandara untuk anak-anak miskin," katanya.

Angka-angka yang dihitung itu, kata Pastika, sebagai bayangan dan pembanding bahwa

dalam memanfaatkan dana APBD Bali, pihaknya tetap berpedoman dengan efisiensi. Sebab, mengumpulkan uang itu sangat berat. "Bukan irit, tapi efisiensi yang saya maksudkan. Jangan salah itu, kita efisiensi," tegas Pastika yang notabene mantan Asisten Perencanaan Kapolri.

Menurut Pastika, mengumpulkan uang supaya menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangatlah susah. Apalagi, dalam situasi ekonomi yang sulit dan lesu saat ini. "Bayangkan itu, kita pungutan Rp 100.000 dengan door to door. Kepala Badan Pendapatan Daerah, Pak Made Santha, itu pusing dia, banyak yang tidak tahu. Tapi, keluarnya anggaran miliaran-miliaran," sebut Pastika.

Selain mengejar pendapatan dengan kerja keras, Pastika bersama SKPD Pemprov Bali juga melakukan penghematan. "Belum lagi kita juga mengurangi kegiatan ke luar negeri, ke luar daerah. Saya kalau diundang ke luar negeri tidak ditanggung yang mengundang, saya nggak berangkat. Pekan ini harusnya kita diundang ke Amerika Serikat. Saya nggak datang."

Terkait polemik dana Pilgub Bali 2018, Pastika mengatakan tetap mengapresiasi sikap anggota Fraksi Panca Bayu DPRD Bali dari NasDem Dapil Buleleng, Nyoman Tirtawan. "Dia ada benarnya juga. Sosialisasi Pilgub, apanya disosialisasikan dengan biaya gede-gede?"

Pemilih sudah tahu ada Pemilu. Mereka dapat surat undangan kok. Kalau mau konsultasi, lewat email sebenarnya sudah bisa itu. Ada internet. Jadi, Tirtawan itu nggak salah dia," papar Pastika.

"Saya katakan sama Ketua KPU Bali Dewa Raka Sandi, saat launching Maskot Pilgub Bali di Bajra Sandhi, 28 Oktober 2017 nanti, jangan mewah-mewah pakai seragam segala, kayak di panti asuhan saja. Itu saya sampaikan saat KPU audiensi ke Kantor Gubernur. Karena tidak ada gunanya seragam banyak-banyak begitu, pemborosan," katanya.

Sementara itu, Ketua Pansus APBD Induk 2018 DPRD Bali, I Gede Kusumaputra, yang dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Senin kemarin, mengatakan bisa saja ada revisi soal dana Pilgub Bali yang dianggarkan multiyears. Itu tergantung di pembahasan APBD 2018. Dalam APBD Induk 2018, dana Pilgub Bali dianggarkan Rp 100 miliar.

"Nanti Komisi I DPRD Bali (yang membidangi Pemilu) yang membahas dengan KPU dan OPD leadingnya, seperti Kesbanglispol dan Tim Anggaran Daerah Pemprov Bali. Kalau memang disepakati revisi, maka hasilnya itu disampaikan ke Pansus APBD Induk 2018. Ya, kami tunggu Komisi I-lah," ujar politisi PDIP asal Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Buleleng yang sudah tiga periode duduk di DPRD Bali ini. **nat**

Edisi : Selasa, 17 Oktober 2017

Hal : 1 & 18

Korupsi Pepadu Jembrana ✓

Penyidik Tetapkan Dua Tersangka Baru

NEGARA, NusaBali

Penyidik Unik Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Jembrana yang menyelidiki kasus dugaan korupsi program Pengembangan Pertanian Terpadu (Pepadu) Pemkab Jembrana tahun 2013, belakangan telah menetapkan dua orang tersangka baru. Kini, dengan tambah dua tersangka tersebut, total sudah ada tiga orang terangka. Di mana untuk berkas kasus tersangka sebelumnya, KRA, yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana, juga telah dinyatakan P-21.

Berdasar informasi, dua tersangka baru tersebut, masing-masing bernisial KW dan YH. Tersangka KW sendiri disebut-sebut merupakan PNS di Pemkab Jembrana yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam program Pepadu tersebut. Sedangkan

YH, adalah kalangan swasta, yang masih berkaitan selaku rekanan dalam pengadaan bantuan program Pepadu tersebut. "YH ini juga tidak lain merupakan suami dari tersangka sebelumnya, KRA, yang juga berkaitan selaku rekanan," jelas sumber.

Kasatreskrim Polres Jembrana, AKP Yusak Agustinus Sooi, ketika berusaha dikonfirmasi, Rabu (18/10), tidak manapik mengenai informasi penetapan dua tersangka baru tersebut. Hanya saja, ia enggan menjelaskan secara rinci identitas kedua tersangka tersebut, termasuk peranan masing-masing, karena mengaku masih terus dialami, dan belum sampai masuk pelimpahan berkas ke Kejari Negara. Sedangkan mengenai berkas tersangka pertama, KRA, yang sudah dilimpahkan ke Kejari Jembrana, dari informasinya, memang sudah lengkap. "Ya, informasinya sudah lengkap semua. Tetapi

untuk pemberitahuan resmi P-21, belum kami terima," ujarnya.

Sementara Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jembrana, I Made Pasek Budiawan, ketika dikonfirmasi secara terpisah, mengakui, kalau berkas perkara tersangka, KRA, terkait kasus dugaan korupsi Pepadu tersebut, sudah diteliti jajarannya. Berkas tersangka, KRA, yang sempat hingga tiga kali dinyatakan belum lengkap atau P-19, sehingga dikembalikan ke penyidik Unit Tipidkor Satreskrim Polres Jembrana itu, kini dinilai memang sudah lengkap. "Ya memang kami lihat sudah lengkap. Tetapi untuk resminya, masih kami proses," katanya.

Sementara disinggung mengenai informasi tambahan dua tersangka dalam kasus tersebut, Pasek Budiawan, mengaku belum ada menerima berkas perkaranya. Tetapi,

ia mengaku sudah mengetahui mengenai penamabahan dua tersangka tersebut, melalui tembusan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dua tersangka yang masih diproses pihak Polres Jembrana. "Ya memang ada tembus SPDP dua tersangka itu. Yang satu seorang PNS bernisial KW, dan yang satu dari kalangan swasta, YH. Lebih jelasnya, Polres yang menangani," ujarnya.

Seperti diketahui, dugaan kasus korupsi yang ditangani Sat Reskrim Jembrana itu, berkenaan dengan masalah pengadaan sebanyak 100 ekor sapi betina dalam program Pepadu tahun 2013. Dalam penyelidikan kasus tersebut, dinilai telah terjadi kerugian negara senilai Rp 82.585.000. Kerugian negara itu, berdasar temuan 30 sapi betina, di antaranya tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.  ode

Edisi : Kamis, 19 Okt 2017

Hal : 5

Dana Desa Terancam Tidak Terserap ★ Diusulkan Revisi Perbup Akibat Kelangkaan Material

SINGARAJA, NusaBali

Masing-masing desa di wilayah Buleleng, mulai kelimpungan mengelola APBDes tahun 2017, akibat kelangkaan dan kenaikan harga material pasir dan batu (Sirtu). Masalahnya jika dipaksakan kegiatan terlaksana akan berpengaruh pada volume pekerjaan. Namun jika tidak dikerjakan, dana itu akan menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).

Celakanya lagi, jika Silpa mencapai diatas 30 persen dari total APBDes, maka tahun depan dana desa dari pusat ditunda. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten pun telah mengusulkan revisi Peraturan Bupati (Perbup) tentang APBDes.

Sejumlah kepala desa (Perbekel) di Buleleng mengaku sulit melaksanakan kegiatan fisik sesuai dengan program yang telah disusun dalam APBDes 2017. Masalahnya, standar harga material sirtu yang disusun saat penyusunan APBDes, dengan situasi yang ada sekarang berbeda jauh, akibat situasi Gunung Agung berstatus awas.

Saat ini harga material sirtu naik tiga kali lipat, dari yang semula sekitar Rp 1.150.000 naik hingga Rp 2.500.00 per truk. Disamping harga naik, material sirtu juga sulit didapat alias langka. Celakanya lagi, dana desa tahap II sebesar 40 persen dari total dana desa yang akan dipakai pembangunan fisik, baru cair pada Oktober ini.

"Kalau dipaksakan, jelas kegiatan fisik itu tidak sesuai dengan volume kegiatan. Kalau tidak dikerjakan, dana itu akan menjadi Silpa. Pusat menyatakan Silpa tidak boleh sampai di atas 30 persen, kalau di atas 30 persen kena sanksi penundaan dana desa tahun depan," kata Kades Bhaktiseraga Gusti Putu Armada, Rabu (18/10).

Hal senada juga disampaikan Ketua Forkomdeslu Kabupaten Buleleng I Made Suteja. Dihubungi pertelepon, Made Suteja menyatakan pemerintah harus segera mencari solusi terkait persoalan yang tengah dihadapi para Kades. Karena jika tidak segera tangani, tidak menutup kemungkinan dana desa itu menjadi Silpa. Apalagi waktu efektif yang ada tinggal dua bulan lagi, sehingga perlu solusi yang cepat dan tepat.

"Kalau dikerjakan memang beresiko, dipastikan tidak sesuai dengan target capaian. Ini justru berisiko lagi menjadi temuan. Kalau dana itu tidak dipakai juga berisiko jumlah Silpa naik," kata Suteja yang segera mengakhiri masa jabatannya sebagai Perbekel Desa Denarik, Kecamatan Banjar ini.

Sementara, Kepala Dinas PMD Buleleng, Gede Sandhiyasa mengatakan, pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan para kepala desa menyikapi situasi yang ada.

Pertemuan dilangsungkan pada Selasa

(17/10) lalu di Dinas PMD Buleleng yang melibatkan Forum Komunikasi Perbekel, Inspektorat Buleleng, Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng, serta Bagian Layanan Pengadaan Setda Buleleng. Dari pertemuan itu pihaknya mengusulkan ada revisi Perbut tentang APBDes 2017. "Karena material mahal dan langka, jadi (perbup) harus berubah. Desa ini kan sudah mencantumkan program dalam APBDes, itu sedang kami kaji agar bisa direvisi dengan Perbup. Sehingga memungkinkan perubahan APBDes. Dasarnya surat dari Pak Gubernur tentang bencana," kata Sandhiyasa saat ditemui di Lobi Atiti Wisma Kantor Bupati Buleleng, kemarin.

Dengan revisi perbup itu, pemerintah desa pun bisa mengajukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Program kegiatan pun bisa dialihkan ke program lain. Dana yang semula digunakan untuk program infrastruktur, bisa dialihkan ke program pemberdayaan. Kalau toh akan melanjutkan program infrastruktur, pemerintah desa bisa melakukan revisi volume.

"Kalau mengubah angka kan tidak mungkin. Bisanya mengubah volume. Misalnya volume awal 10, dikurangi jadi 5, atau yang mendekati angka awal. Kalau mau mengubah program, harus ubah RKP desa. Jalan keluarnya seperti itu," imbuh Sandhiyasa. Opsi itu mau tak mau diambil, untuk mencegah sanksi penundaan dana desa pada tahun berikutnya. **k19**

Edisi : Kamis, 19 Oktober 2017

Hal : 4

Polemik Soal Anggaran Pilgub Bali Rp 229,36 Miliar 'Bukan Besar-Kecil, tapi Transparansi'

DENPASAR, NusaBali

Pengamat politik dan pemerintahan dari Undiknas Denpasar, Dr Nyoman Subanda MSI, angkat bicara terkait dana Pilgub

Bali 2018 sebesar Rp 229,36 miliar, yang kini mengundang polemik karena adanya usulan untuk direvisi. Bagi Subanda, masalah dana Pilgub Bali 2018 ini bukan

soal besar dan kecil, namun transparansi dan penguanaannya yang harus ada pertanggungjawaban.

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

'Bukan Besar-Kecil, tapi Transparansi'

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Subanda menyebutkan, dana Pilgub Bali 2018 yang besarnya sudah disepakati dengan Nota Perjanjian Hibah Daerah (HPHD), merupakan keputusan eksekutif-legislatif. "Tentunya ada dasar-dasar dana sebesar Rp 229,36 miliar itu ditetapkan. Kalau mau direvisi lagi, itu tingkat komunikasi KPU Bali dengan DPRD Bali dan Pemprov Bali," tandas Subanda di Denpasar, Selasa (17/10).

Menurut Subanda, penempatan dana Pilgub Bali 2018 sebesar Rp 229,36 miliar pasti ada dasarnya. Misal, ada dasar studi banding dengan daerah lain. Dengan wilayah Bali yang tidak begitu luas, kata Subanda, dana Pilgub 2018 semestinya lebih efisien, terutama dalam pengadaan logistik.

"Bali tidak seperti Papua, yang membutuhkan banyak biaya untuk menangani logistik, kemudian pengiriman logistik. Kalau ada studi banding dan dijadikan dasar keputusan, saya rasa tidak masalah," ujar akademisi asal Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Buleleng ini.

Yang lebih utama, lanjut Subanda, dana Pilgub Bali bukan masalah besar atau kecil. Tapi, sejauh mana dana tersebut bisa dipertanggungjawabkan oleh pengguna anggaran. "Yang penting, anggaran itu digunakan secara tepat dan ada pertanggungjawaban jelas, serta transparan. Jangan sampai ada yang digelembungkan. Itu kalau bicara kasus," tegas Subanda.

Kalau berbicara yang mana lebih penting antara Pemilu

atau urusan rakyat, menurut Subanda, jelas urusan rakyat lebih penting. Terlebih, dalam suasana keprihatinan seperti sekarang. "Kalau bicara mana lebih penting dari sisi ilmu pemerintahan, ya jelas rakyat lebih penting. Ada istilah Citizen First, urusan warga negara itu lebih utama," katanya.

"Saya tidak mengatakan Pemilu tidak penting. Kalau, misalnya, rakyat sedang kelaparan, kan tidak bisa dipaksakan harus ada Pemilu. Apalagi, dengan kebutuhan dana yang besar. Jadi, ada yang lebih utama untuk dilaksanakan," lanjut Subanda.

Sementara itu, mantan Ketua KPU Bali Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa mengatakan pembiayaan Pilgub selalu ada pembahasan-pembahasan antara eksekutif-legislatif dan KPU Bali. "Semuanya melalui data dengan merinci kebutuhan anggaran, disertai dengan payung hukum yang ada. Itu pengalaman saya ketika di KPU Bali," ujar Lanang Perbawa saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Selasa kemarin.

Menurut Lanang, kalaupun ada kelebihan anggaran, setelah Pemilu selesai biasanya ada mekanisme yang dilakukan. "Lebih sederhananya, kelebihan dana itu dikembalikan ke kas daerah. Ada pertanggungjawaban juga. Kalau ada sisa dikembalikan, itu menjadi Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Red)," tegas Lanang yang kini menjadi Komisararis BPD Bali.

Lanang mencontohkan, anggaran Pilgub Bali naik dari waktu ke waktu, seiring den-

gan meningkatnya harga barang. Anggaran Pilgub Bali 2008, misalnya, hanya mencapai Rp 43,71 miliar. Sedangkan Pilgub Bali 2013 dianggarkan Rp 133,10 miliar dengan asumsi terjadi tarung dua putaran dan pemungutan suara ulang. Nah, untuk Pilgub Bali 2018 anggarannya direncanakan sebesar Rp 229,36 miliar, dengan asumsi terjadi tarung satu kali putaran dengan kontestan 6 pasangan calon.

Lanang menyebutkan, kebutuhan anggaran Pilgub dari waktu ke waktu meningkat, karena meningkatnya harga barang. "Kalau harga barang tahun 2008, tentu berbeda dengan tahun 2013 atau 2018. Ada kenaikan, sehingga dalam pengadaan logistik, jelas ada hitung-hitungan," tandas tokoh asal Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Buleleng ini.

Soal adanya perbandingan kebutuhan anggaran antara Pilgub Bali 2018 dan Pilgub Jawa Barat 2018, di mana jumlah pemilih di Jawa Barat mencapai 32 juta, sementara pemilih di Bali hanya 3,2 juta, menurut Lanang, tidak sepenuhnya bisa dibandingkan. "Kalau kita membeli barang dalam jumlah besar, harganya itu lebih murah ketimbang membeli barang yang volumenya sedikit. Dan, masih banyak variabel-variabel yang dijadikan acuan," ujar Lanang, yang asal sekampung dengan Nyoman Tirtawan, anggota Fraksi Panca Bayu DPRD Bali dari NasDem Dapil Buleleng yang cetuskan usulan revisi anggaran Pilgub Bali 2018. **nat**

Edisi : Rabu, 18 Oktober 2017

Hal : 1 x 15